

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DI DESA PALAMPITAN HILIR KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Putri Regina Arini<sup>1</sup>, Irza Setiawan<sup>2</sup>, Nida Urahmah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email: [reginaariniputri@gmail.com](mailto:reginaariniputri@gmail.com)

### ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk akan selalu berkaitan dengan masalah lingkungan hidup penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah dan faktor menghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan dengan teknik *Snowball* Hasil penelitian belum baik: sub variabel komunikasi di ketahui indikator transmisi belum baik, , indikator kejelasan dan konsisten cukup baik. sub variabel sumber daya sumber daya manusia cukup baik dan indikator sumber daya non manusia belum baik. *Ketiga*, sub variabel disposisi di ketahui komitmen implementor dan pemahaman implementor cukup baik. struktur birokrasi dilihat pada indikator SOP belum baik , indikator *fragmentasi* dan koordinasi antar instansi cukup baik . Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri. faktor pendukung : terjalin koordinasi yang baik antar badan pelaksana. faktor penghambat meliputi : kurangnya tindakan tegas kurangnya sosialisasi.Berdasarkan hal tersebut disarankan Kepala Dinas melakukan sosialisasi rutin. Kepada pedagang di desa Palampitan Hilir hendaknya dalam berdagang menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan. Kepada pembeli , hendaknya mengurangi penggunaan kantong plastik.

**Kata Kunci** : Implementasi, Peraturan, Kantong Plastik

### ABSTRACT

*Population growth will always be related to environmental problems. This research aims to find out the implementation of North Hulu Sungai Regency Regent's Regulation Number 8 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags in Palampitan Hilir Village, Central Amuntai District and the factors inhibiting it. This research uses a qualitative descriptive type qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data source was taken through informants using the Snowball technique. The results of the research were not good: the communication sub-variables were found to be not good, the indicators for clarity and consistency were quite good. The human resources sub-variable is quite good and the non-human resources indicators are not good. Third, the disposition sub variable is known to implementer commitment and implementor understanding is quite good. The bureaucratic structure seen in the SOP indicator is not good, the indicators of fragmentation and coordination between agencies are quite good. The influencing factors consist. supporting factors: good coordination between implementing agencies. Inhibiting factors include: lack of firm action, lack of socialization. Based on this, it is recommended that the Head of Service carry out routine socialization. Traders in Palampitan Hilir village should use environmentally friendly plastic bags when trading. Buyers should reduce the use of plastic bags..*

**Keywords**: Implementation, Regulations, Plastic Bags

## PENDAHULUAN

Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pula lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pertumbuhan penduduk akan selalu berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Penduduk dengan segala aktivitasnya akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Demikian pula dengan meningkatnya upaya pembangunan, menyebabkan makin meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup, baik itu berdampak positif maupun negatif yang mana mempengaruhi kesejahteraan hidup.

Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pesat, sehingga menyebabkan berbagai masalah demi masalah muncul di masyarakat semakin beragam. Sebagai masyarakat yang berjiwa sosial, masyarakat harus mempunyai kesadaran akan peduli terhadap masyarakat yang lain termasuk juga terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya seperti lingkungan. Kelestarian lingkungan sangat bergantung pada setiap kegiatan masyarakat. Masing-masing individu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan agar tidak rusak. Karena jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan plastik yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Penumpukan sampah atau limbah plastik yang sulit untuk terdegradasi secara sempurna akan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

Kantong Plastik menjadi bahan penting selalu digunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari. Misalnya untuk tempat minuman, membungkus makanan, tempat belanjaan dan masih banyak lagi. Plastik dipakai karena ringan, tidak mudah pecah, harganya murah, dan mendapatkannya pun sangat mudah. Penggunaan Kantong plastik menjadikan kebutuhan untuk semua masyarakat dilihat dari berbagai produsen Kantong Plastik yang memiliki kualitas yang berbeda dan harga yang relatif murah menjadikan Kantong Plastik sebagai kebutuhan kehidupan sehari-hari, dilihat dari dari peningkatan penggunaan kantong plastik oleh masyarakat luas tidak disertakan dengan alat dan kemampuan mendaur ulang berakibat menumpuknya sampah kantong plastik yang dapat memberikan dampak buruk bagi bagi bumi, plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sampah plastik baru bisa terurai secara sempurna dengan waktu yang begitu lama sekitar 100 hingga 500 tahun. Dengan sifat plastik yang sulit terurai tersebut dengan kandungan bahan didalamnya ternyata memberikan banyak dampak negatif. Adapun dampak negatif tersebut, diantaranya pencemaran air dan tanah, pemanasan global, polusi udara, mengacaukan proses rantai makanan, dan bahaya banjir. Sehingga penggunaan plastik sangat beresiko terlebih pada era modern saat ini dimana masyarakat saat ini banyak menggunakan plastik sebagai bahan untuk membungkus kebutuhan rumah tangganya. Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah yang ada di Hulu Sungai Utara merupakan tempat jual beli yang paling banyak karena berada di titik pusat kota Amuntai, tak heran jika bermacam jualan yang ada di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah banyak pedagang maupun pembeli masih menggunakan kantong plastik. Bukan tanpa alasan mengapa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara membuat kebijakan tersebut, karena salah satu pemasukan terbesar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dari retribusi. Maka dari itu, penggunaan kantong plastik sangat tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena hal ini adalah tempat bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan, sehingga penggunaan kantong plastik tidak terhindarkan. Adapun beberapa fenomena masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi antara pihak terkait kepada para pedagang yang ada agar para pedagang maupun pembeli tidak membuang sampah seperti kantong plastik dibahu jalan sehingga sampah tersebut menumpuk, karena hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: (1)

*Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan pemakaian kantong plastik dan melaksanakan kegiatan yang mendukung Rencana Aksi Daerah. (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.*

2. Kurangnya sosialisasi pihak terkait tentang pengurangan penggunaan kantong plastik yang ada di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah agar mereka tidak terlalu banyak memakai kantong plastik untuk menjual maupun membeli dagangan yang ada. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 5 ayat 3 yang menyatakan bahwa: *Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 bulan sekali.*
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait tentang penggunaan kantong plastik, sehingga banyaknya tumpukan sampah seperti kantong plastik yang berserakan di bahu jalan, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2

## METODE

Lokasi penelitian ini, akan dilaksanakan di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan dengan teknik *Snowball Sampling* berjumlah 9 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan *member check*.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut George C. Edwards III (Ag Subarsono 2020:90-92) yang terdiri dari:

### 1. Komunikasi

Komunikasi, adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.

#### a. Transmisi

Transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi (data), karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode/isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan indikator transmisi belum baik, karena tidak adanya penyampaian peraturan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik.

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan teori implementasi menurut teori George C. Edwards III (Ag Subarsono 2020:90-92) yang menyatakan bahwa komunikasi, adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.

#### b. Kejelasan

Kejelasan adalah sesuatu yang mudah dipahami dan dianggap sebagai upaya dalam pemahaman terhadap sesuatu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan indikator kejelasan cukup baik, karena kebijakan ini telah jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori implementasi menurut teori George C. Edwards III (Ag Subarsono 2020:90-92) yang menyatakan bahwa komunikasi, adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.

### c. **Konsisten**

Konsisten adalah kemampuan untuk terus menerus berusaha sampai suatu pencapaian berhasil diraih, tidak ada satu hal di dunia ini yang bisa menggantikan konsistensi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan indikator konsisten cukup baik karena Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara sering melakukan berbagai hal terkait upaya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik semenjak peraturan tersebut ditetapkan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori implementasi menurut teori George C. Edwards III (Ag Subarsono 2020:90-92) yang menyatakan bahwa komunikasi, adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.

### 2. **Sumberdaya**

Sumber daya, Merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Pendekatan sumber daya merupakan hal yang penting dalam keberhasilan implementasi, sumber daya utama dalam kebijakan adalah aparatur/pegawai atau sumber daya manusia.

#### a. **Sumberdaya Manusia**

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan indikator sumber daya manusia cukup baik, SDM yang berlakukan dalam menjalankan tugas ini adalah dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dibawah naungan Bupati Hulu Sungai Utara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut teori George C. Edwards III (Ag Subarsono 2020:90-92) yang menyatakan bahwa Sumber daya, Merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.

#### b. **Sumberdaya Non Manusia**

Maksudnya sumber daya non manusia adalah sumber daya yang berhubungan dengan benda (sarana prasarana).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan indikator sumber daya non manusia belum baik karena, kurangnya sarana prasarana yang menunjang dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori implementasi menurut teori George C. Edwards III (Ag Subarsono 2020:90-92) yang menyatakan bahwa Sumber daya, merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.

### 3. **Disposisi**

Disposisi, adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti kometmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

#### a. **Kometmen Implementor**

Kometmen implementor adalah kometmen pelaksana dalam suatu organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan indikator komitmen implementor cukup baik, agar kebijakan ini berjalan baik maka ada para birokrasi yang ditunjuk dalam melaksanakan kebijakan ini yang mana satu dengan lain saling berkaitan untuk mencapai tujuan sejak kebijakan ini ditetapkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut teori George C. Edwards III (Ag Subarsono 2020:90-92) yang menyatakan bahwa Disposisi, adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana kebijakan.

#### b. **Pemahaman Implementor Terhadap Kebijakan (Kognisi)**

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan indikator pemahaman implementor terhadap kebijakan (kognisi) cukup baik, pegawai pada Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah memahami terkait kebijakan ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut teori George C. Edwards III (Ag Subarsono 2020:90-92) yang menyatakan bahwa Disposisi, adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur Berokrasi, Menunjukkan bahwa struktur berokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur berokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mikanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

##### a. SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat indikator SOP belum baik karena masih banyak pengguna kantong plastik pada perdagangan yang tidak dilakukan sosialisasi dan pelatihan maupun kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan SOP.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori implementasi menurut teori George C. Edwards III (Ag Subarsono 2020:90-92) yang menyatakan bahwa Struktur Berokrasi, Menunjukkan bahwa struktur berokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.

##### b. Fragmentasi (Pembagian Tanggung Jawab)

*Fregmentas* yakni tak lain adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan birokrat diantara beberapa unit kerja.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan indikator fragmentasi (pembagian tanggung jawab) cukup baik, pembagian wewenang diserahkan kepada Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut teori George C. Edwards III (Ag Subarsono 2020:90-92) yang menyatakan Aspek struktur berokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mikanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

##### c. Koordinator Antar Instansi

Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu demikian rupa, sehingga mendapat, saling mengeri, saling membantu, dan saling melengkapi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan koordinasi antar instansi cukup baik, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai badan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan oleh plastik dan masyarakat serta pedagang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut teori George C. Edwards III (Ag Subarsono 2020:90-92) yang menyatakan bahwa Aspek struktur berokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mikanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari faktor pendorong dan penghambat sebagai berikut :

#### 1. Faktor Pendukung

##### a. Koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa terjalin koordinasi yang baik antar badan pelaksana seperti pertanggung jawaban UPT Pasar terhadap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan Peraturan.

#### 2. Faktor Penghambat

##### a. Kurangnya tindakan tegas terhadap pedagang yang menggunakan kantong plastik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan kurangnya tindakan tegas terhadap pedagang yang menggunakan kantong plastik dengan alasan pembeli

mebutuhkannya untuk mudah membawa belanjaan dan tidak semua pedagang mau diberikan arahan .

## b. Kurangnya Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan kurangnya sosialisasi karena kurang jelasnya kebijakan karena sasaran dalam kebijakan ini (pedangang dan pembeli) tidak memahami tentang Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebab tidak ada penyampaian peraturan secara menyeluruh.

## SIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik dapat dilihat pada : *Pertama*, sub variabel komunikasi di ketahui indikator transmisi belum baik, karena karena pedagang maupun masyarakat serta Dinas terkait tidak saling terhubung atau tidak saling berbagi informasi terkait Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, indikator kejelasan cukup baik, karena kebijakan ini telah jelas dan mudah dipahami yaitu pemakaian kantong plastik menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari kantong plastik dengan cara mengurangi penggunaannya dan indikator konsisten cukup baik karena Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan berbagai kegiatan secara berkala terkait Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sejak tahun 2019. *Kedua*, sub variabel sumber daya di ketahui sumber daya manusia cukup baik, SDM yang berlakukan dalam menjalankan tugas ini adalah dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan indikator sumber daya non manusia belum baik karena, sarana prasarana seperti limbah-limbah atau pembuangan sampah yang tidak berfungsi karena masyarakat lebih memilih membuang sampah sembarangan terutama kantong plastik. *Ketiga*, sub variabel disposisi di ketahui indikator komitmen implementor cukup baik, agar kebijakan ini berjalan baik maka ada para birokrasi yang ditunjuk dalam melaksanakan kebijakan ini yang mana satu dengan lain saling berkaitan untuk mencapai tujuan sejak kebijakan ini dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berkomitmen dalam mengupayakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan indikator pemahaman implementor terhadap kebijakan (kognisi) cukup baik, pegawai pada Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah memahami terkait kebijakan ini, kebijakan ini terkait pengurangan pemakaian kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan pemakaian secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik. *Keempat*, sub variabel struktur birokrasi dilihat pada indikator SOP belum baik karena masih banyak pengguna kantong plastik yang tidak dilakukan sosialisasi dan pelatihan maupun kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan SOP, indikator fragmentasi (pembagian tanggung jawab) cukup baik, pembagian wewenang diserahkan kepada Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dan indikator koordinasi antar instansi cukup baik, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai badan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan oleh plastik dan UPT Pasar sebagai pengawas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari faktor pendorong dan penghambat sebagai berikut menjadi dua. *Pertama* faktor pendukung : terjalin koordinasi yang baik antar badan pelaksana. *Kedua*, faktor penghambat meliputi : kurangnya tindakan tegas terhadap pedagang yang menggunakan kantong plastik dengan alasan pembeli membutuhkannya untuk

mudah membawa belanjaan dan tidak semua pedagang mau diberikan arahan dan kurangnya sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*,



2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.